

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Manggarai dan NTT, 2018. <https://manggaraikab.bps.go.id>.
- Brubacher, John S. *A History of The Problems of Education*. New York and London: McGraw –Hill Book Company, Inc, 1947.
- Calhoun, C. *Critical Social Theory*. Cambridge, MA: Blackwell, 1995.
- Francis Fukuyama & Samuel P. Huntington, *The Future of The World Order (Masa Depan Peradaban dalam Cengkeraman Demokrasi Liberal versus Pluralisme)*, Yogyakarta: IRCiSod, 2005.
- Jena, Yeremias. *Critical Thinking: Membangun Pemikiran Logis*. Jakarta: Sinar Harapan, 2012.
- Kinch, J.W. *Social Problems in the World Today*, London: Addison-Wesley Publishing Company, 1974. Bdk. Yeremias Jena, *Critical Thinking: Membangun Pemikiran Logis*. Jakarta: Sinar Harapan, 2012.
- Nugroho, Riant. *Merancang Strategi Pendidikan yang Visioner*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- O’Sullivan, Edmund. *Learning Transformative: Educational Vision for 21st Century*, UK: Zed Books Ltd., 7, 2007.
- Renstra Kemendikbud 2015-2019.
- Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2016, 2017. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Nasional.
- Suryana, S. ”Kebijakan Mutu Pendidikan: Analisis Model Indikator Pendidikan”; *Edukasi Tahun XVII No. 3* hlm. 1-16. Edisi September-Desember 2007.
- Zevin, Jack. *Social Studies for The Twenty-First Century; Methods and Materials for Teaching in Middle and Secondary Schools*, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2007.

EKOSIDA, BUNUH DIRI EKOLOGIS, DAN KEMESTIAN TEOLOGI EKOLOGI

Oleh Benny Denar¹

Pendahuluan

Kemisikinan, pluralitas agama dan budaya, serta faktum semakin masifnya kerusakan lingkungan hidup adalah konteks berteologi di Asia. Oleh karena itulah, dibutuhkan teologi Katolik khas Asia di mana Allah direfleksikan dalam konteks hidup umat Asia.² Teologi khas Asia ditantang untuk merefleksikan kehadiran Allah dalam konteks kemiskinan, kemajemukan agama dan budaya, serta fakta semakin terdegradasinya keseimbangan ekologi akibat orientasi pembangunan yang semakin antroposentris dan berjangka pendek.

Tulisan ini secara khusus merefleksikan konteks degradasi ekologis sebagai salah satu kemestian keprihatinan teologi saat ini. Menjadi kemestian karena dalam kenyataan politik pembangunan yang berorientasi semata-mata pengejaran pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan ekosida atau kerusakan lingkungan yang kian masif dan pada akhirnya memperburuk posisi kaum miskin. Pembangunan

¹ Imam Keuskupan Ruteng, M.A Teologi STFK Ledalero, Maumere-Flores; Pengajar Pendidikan Lingkungan Hidup di STIPAS St. Sirilus, Ruteng-Flores.

² Stephen B. Bevans menyebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang disebut sebagai teologi. Teologi yang ada adalah teologi kontekstual: teologi hitam, teologi feminis, teologi asia, teologi pembebasan, dan lain-lain. Di sini dibutuhkan usaha kontekstualisasi teologi, yaitu suatu imperatif untuk memahami iman Kristen dalam konteks tertentu. Maka, kita dapat mengatakan teologi asia adalah usaha untuk memahami iman kristiani dalam konteks hidup orang Asia dengan segala kekhasan dan kerumitannya. Bdk. Stephen B. Bevans, *Model-model Teologi Kontekstual*, Cetakan ke-2, terj. Yosef Maria Florisan, Maumere: Ledalero, 2013, hlm. 1

tidak menjadi jalan bagi perbaikan kualitas hidup manusia dengan daya dukung lingkungan yang memadai, tetapi malah menjadi senjata untuk melakukan bunuh diri secara ekologis. Oleh karena itulah, teologi Katolik mesti menjadikan tragedi bunuh diri ekologis sebagai sebuah keprihatinan dalam berteologi, sekaligus menyiapkan fondasi bagi pastoral ekologi.

Jebakan Pembangunan

Retorika pembangunan kian patut dicurigai, karena memang konsep pembangunan itu sendiri berwajah ganda. Berwajah ganda karena bagi kelompok tertentu pembangunan memang sukses mendatangkan kemakmuran, namun bagi banyak kelompok lain pembangunan tidak saja gagal mendatangkan kesejahteraan, tetapi justru melahirkan kemiskinan sistemik, kehancuran ekologis, dan destruksi budaya. Bahkan, secara kasat mata, pembangunan tampak hanya berujung pada dominasi, pencaplokan sumber daya, marginalisasi, subordinasi, eksploitasi, dan kekerasan dalam berbagai bentuknya.³

Pembangunan kini semakin tampak antagonis⁴ karena jebakan *global development* yang indah diopinikan tetapi sarat dengan kepentingan kelompok liberalis untuk meraih kepentingan pragmatis tanpa mengindahkan daya dukung lingkungan. Dalam jebakan *global development*, pembangunan memang sukses memberikan “karpet merah” bagi pemodal dan segala kepentingannya, namun mencampakkan masyarakat lokal dalam kebangkrutan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Atas nama kemajuan dan pertumbuhan ekonomi, penguasa politik dengan segala kekuatan oligarkinya justru berada pada pihak pemodal (korporasi) dan mendukung agenda liberalisasi dan privatisasi. Tirani kapitalisme atas nama pembangunan yang ditopang secara kuat oleh kepentingan rezim politik tertentu pasti akan memicu pertumbuhan ekonomi

³ Cypri Jehan Paju Dale, *Kuasa, Pembangunan, dan Pemiskinan Sistemik*, Labuan Bajo: Sunspirit Books, 2013, hlm. x-xi.

⁴ Benny Denar, “Sisi Antagonis Pembangunan dan Opsi Dekolonial dalam Teologi Katolik”, dalam Matias Daven dan Georg Kirchberger (eds.), *Hidup Sebuah Pertanyaan Kenangan 50 Tahun STFK Ledalero*, Maumere: Ledalero, 2019, hlm. 454-455.

yang dibarengi oleh parahnya kerusakan sosial, sekaligus degradasi lingkungan hidup.⁵

Ekosida dan Bunuh Diri Ekologi

Dalam jebakan kapitalisme global, pembangunan kian gagal menghantar rakyat menuju “tanah terjanji” tetapi lebih sebagai jalan bagi munculnya ekosida dan lebih sebagai tindakan bunuh diri ekologis. Ekosida merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Arthur W. Galston, seorang ahli biologi dan ahli botani Amerika, dalam Konferensi Pertanggungjawaban terhadap Perang di Washington. Seminar tersebut sebenarnya menyoal kebrutalan tentara Amerika yang menggempur tentara Viet Cong dengan menyebarkan 19.000 ton bahan kimia di hutan-hutan persembunyian mereka. Penyebaran bahan kimia berbahaya tersebut tak hanya menghancurkan tanaman, flora, dan fauna, tetapi juga diperkirakan mengubah gen manusia.⁶ Sejak itu, ekosida menjadi istilah populer di kalangan aktivis lingkungan untuk menyebut penghancuran lingkungan besar-besaran.⁷

Secara tegas ekosida dapat dikatakan sebagai tindakan pemusnahan sumber daya alam secara terstruktur, sistematis, dan masif.⁸ Dalam bentuk lain, ekosida juga terjadi karena masyarakat dan bahkan

⁵ Max Regus, “Membongkar Aib Pembangunan”, dalam Paul Budi Kleden, Otto Gusti Madung, dan Anselmus Meo (eds.), *Allah Menggugat Allah Menyembuhkan*, Maumere: Ledalero, 2012, hlm. 371-376.

⁶ Istilah *ecocide* secara politis digunakan pada 1972 di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Konferensi Lingkungan hidup di Stockholm-Swedia. *Stockholm Conference* adalah konferensi internasional pertama yang fokus pada isu-isu lingkungan hidup, terutama dalam kaitannya dengan degradasi lingkungan hidup dan polusi lintas batas. Bdk. Ridha Saleh, dkk., *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi*, Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2019, hlm. 32-34.

⁷ Dewi Candraningrum, Ekosida, dalam <https://www.jurnalperempuan.org/blog/ekosida1>, diakses pada 5 Januari 2020.

⁸ Polly Higgins, perempuan aktivis dan pengacara dari London pernah mengajukan sebuah proposal hukum kepada PBB pada April 2011. Dalam proposal itu, dia memasukkan pemusnahan lingkungan secara besar-besaran—disebut ekosida (*ecocide*)—sebagai kejahatan kelima terhadap perdamaian. Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) dibentuk tahun 2002 untuk mengadili kasus-kasus yang menyangkut empat kejahatan terhadap perdamaian: genosida, kejahatan perang, kejahatan agresi, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bdk. <https://madealikade.wordpress.com/2016/08/29/ekosida/>, diakses pada 5 Januari 2020.

aktor pengambil keputusan politik sengaja membiarkan dan bahkan menjadi pelaku perusakan lingkungan. Tindakan ekosida di antaranya berupa alih fungsi hutan yang tak terkendali—misalnya untuk kepentingan pertambangan, pariwisata, perkebunan dan lain-lain—, perusakan habitat binatang, pengurusan populasi ikan, buruknya manajemen air bersih, kegagalan pengelolaan sampah, perusakan laut, serta berbagai bentuk perusakan lingkungan lainnya.

Ekosida merupakan eksploitasi masif terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang mengarah pada pemusnahan sumber daya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya.⁹ Jadi, tindakan ekosida tidak saja merusak lingkungan, tetapi juga akan mengancam eksistensi manusia, terutama golongan masyarakat yang paling miskin. Sebagai contoh, studi-studi di wilayah lingkaran tambang memperlihatkan bahwa investasi pertambangan yang dilakukan di dekat wilayah mereka, selain telah merusak lingkungan, juga merusak sumber-sumber ekonomi warga yang mayoritas petani, meretakkan kohesi sosial antarwarga, mendestruksi budaya, termasuk menimbulkan beragam penyakit yang mematikan.

Secara singkat, kejahatan lingkungan (ekosida) khususnya terkait investasi pertambangan membawa dampak nyata baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat lokal.¹⁰ Pertama, dampak lingkungan. Studi-studi pada masyarakat lingkaran tambang memperlihatkan investasi pertambangan yang banyak dilakukan secara serampangan pasti merusak lingkungan hidup. Pengalihan fungsi hutan yang dimulai dari penebangan hingga penggalian dan pembuangan limbah hasil tambang secara otomatis mengubah lahan dan merusak ekosistem. Walaupun, misalnya, ada reklamasi, namun hal tersebut tidak akan mampu mengembalikan keadaan lingkungan seperti sedia kala. Setidaknya akan tetap tersisa wilayah dengan lubang bekas tambang. Namun, investor-investor nakal biasanya pergi begitu saja tanpa

⁹ Ridha Saleh, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 56.

¹⁰ Benny Denar, *Mengapa Gereja (Harus!) Tolak Tambang?*, Maumere: Ledalero:2015, hlm. 173-180. Hal-hal ini ditemukan juga dalam wilayah dan masyarakat bekas lingkaran tambang. Bdk. Benny Denar, Keristian Dahurandi, dan Vinsensius Nase, *Kiprah Gereja Katolik dalam Mendampingi Masyarakat Pasca-tambang di Kabupaten Manggarai Flores Barat*—Laporan Penelitian Dosen PTAKS di Lingkungan Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia, hlm. 39-40.

berusaha melakukan perbaikan. Lubang bekas tambang dibiarkan menganga. Tidak ada usaha penghijauan. Hal itu menyebabkan curah hujan menurun dan debit air berkurang. Dampak yang berdekatan adalah timbulnya berbagai penyakit dan kualitas kesehatan masyarakat semakin menurun. Padahal mereka adalah orang-orang miskin yang tak memiliki kesanggupan untuk membayar biaya kesehatan yang kian mahal karena rumah sakit dan fasilitas kesehatan kita juga pelan-pelan masuk dalam perangkat kepentingan kapitalisme liberal.

Kedua, dampak ekonomi. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya industri pertambangan tentu saja akan amat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian warga. Sebagai petani, mereka lebih banyak hidup dari kemurahan alam. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan amat berpengaruh terhadap penghasilan mereka di sektor pertanian. Masyarakat lingkaran tambang biasanya mengakui bahwa setelah beroperasinya pertambangan lahan-lahan pertanian milik warga menjadi kering dan kesulitan mendapatkan air, karena curah hujan berkurang. Kondisi ini menyebabkan penghasilan warga dari sektor pertanian kian menurun. Hal ini berdampak panjang. Sebab lahan kritis bekas wilayah tambang sangat sulit dikembalikan lagi sesuai fungsi awalnya. Sementara itu, warga yang menggantungkan hidupnya dari hasil-hasil laut juga pasti dirugikan sebab limbah pertambangan kerap mematikan ekosistem laut.

Sangat jelas bahwa industri pertambangan menyebabkan banyak warga kehilangan lahan pekerjaannya. Pertambangan menyebabkan kekayaan alam dan lingkungan yang seharusnya diperuntukkan bagi semua orang, telah dimonopoli dan dirusakkan oleh keserakahan segelintir orang yang terus mengejar keuntungan pribadi.¹¹ Di pihak lain, terdapat kecenderungan terjadinya pola hidup konsumtif-materialistik pada masyarakat di sekitar daerah industri pertambangan. Hal ini ditandai oleh ketergantungan luar biasa pada ekonomi uang tunai karena semua kebutuhan mereka telah terintegrasi pada sistem pasar. Investasi pertambangan dan berbagai investasi di bidang lingkungan hidup yang serampangan sering merupakan model pemiskinan paling masif karena membuat masyarakat menggantungkan hidupnya kepada

¹¹ Bob Goudzwaard dan Harry de Lange, *Di Balik Kemiskinan dan Kemakmuran*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 25.

investor. Masyarakat diakali sehingga masuk dalam mekanisme pasar yang justru menempatkan mereka pada posisi tawar lemah berhadapan dengan kekuatan korporasi.

Ketiga, dampak sosial dan budaya. Industri pertambangan juga amat berdampak buruk terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal, terutama menyebabkan rontoknya tatanan sosial dan ikatan kekeluargaan antarwarga. Hal tersebut rentan memunculkan perpecahan, persengketaan, dan bahkan konflik yang mengarah kepada usaha melenyapkan eksistensi mereka sendiri satu sama lain. Di sisi lain, mekanisme resolusi konflik tradisional yang telah lama hidup dalam masyarakat tidak lagi dijadikan kontrol dalam kehidupan sosial. Sebab, investor biasanya mengacak-acak struktur kelembagaan masyarakat lokal untuk kepentingan investasi mereka. Masyarakat tercabut dari realitas sosial dan kulturalnya sendiri yang membuat mereka seolah menjadi orang asing di tanah leluhur mereka. "Perasaan terusir dari lingkungannya sendiri, ketidakmampuan untuk ikut menikmati hasil bumi yang dipijaknya, dampak ekonomi dan sosial yang tidak selalu positif, semuanya menjadi dampak yang harus ditanggung oleh masyarakat."¹²

Sampai di sini dapat terlihat bahwa ekosida atau perusakan lingkungan secara masif dan sistematis, termasuk atas nama politik pembangunan pada akhirnya mencampakkan masyarakat miskin dan sederhana dalam pemiskinan yang sistemik dan kegersangan kultural. Studi-studi seputar investasi terutama di bidang lingkungan menunjukkan bahwa masyarakat lokal adalah korban paling rentan dari investasi-investasi di bidang lingkungan. Mereka adalah orang-orang miskin yang gampang dilahap oleh tipu daya investasi yang rakus dan serampangan. Sebab, ekosida hampir pasti selalu merusakkan lahan pertanian masyarakat miskin, merusakkan pemukiman, menghilangkan mata pencaharian, merusakkan lingkungan, juga menyebabkan hilangnya nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur mereka. Dengan demikian pembangunan gagal membawa masyarakat kepada cita-cita kemakmuran, namun pembangunan dengan jalan ekosida justru lebih sebagai tindakan bunuh diri secara ekologis.

¹² Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran-Perantau KWI, *Animasi Keadilan dan Perdamaian*, Jakarta: KWI, 2008, hlm.35.

Bunuh diri ekologis merupakan istilah dari Jared Diamond dalam bukunya, *Collapse; How Societies Choose to Fail or Succeed*, untuk menunjukkan pesan kegagalan masyarakat dalam mengelola dan merawat lingkungan hidup. Jared Diamond menemukan ada 12 kesalahan pengelolaan lingkungan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan bunuh diri secara ekologis.¹³ Adapun kesalahan-kesalahan tersebut adalah menguatnya deforestasi dan perusakan habitat, perusakan tanah yang menyebabkan terjadinya erosi, salinasi dan lahan tandus, kesalahan pengelolaan sumber daya air, tindakan perburuan yang berlebihan, penangkapan ikan yang tak terkendali, pertumbuhan populasi yang tak terkendali, usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan mengeruk kekayaan alam, perubahan iklim yang lebih banyak karena manusia, tindakan membuang bahan kimia beracun ke lingkungan yang tak semestinya, pemakaian sumber daya energi yang tak terkendali, dan pemanfaatan fotosintesa bumi secara berlebihan.

Sampai di sini dapat terlihat bahwa pembangunan dengan jalan merusakkan lingkungan justru merupakan bagian dari tindakan bunuh diri ekologis. Di Keuskupan Ruteng, berdasarkan hasil Sinode III tindakan bunuh diri ekologis itu tampak dalam tiga hal utama, yaitu kegiatan pertambangan yang merusak kehidupan manusia dan keseimbangan lingkungan, perusakan hutan akibat model pengelolaan tak berkelanjutan, dan masalah sampah yang cukup menemarkan lingkungan serta membahayakan kesehatan.¹⁴ Tindakan bunuh diri ekologis akan semakin nyata apabila pemerintah semakin mengejar target investasi atas nama pembangunan tanpa mempertimbangkan aspek keutuhan ciptaan dan nasib warga lokal.

¹³ Jared Diamond, *Collapse; How Societies Choose to Fail or Succeed*, USA: Penguin Books, 2005, hlm. 486-496.

¹⁴ Panitia Sinode III Keuskupan Ruteng, *Dokumen Sinode III 2013-2015 Keuskupan Ruteng Pastoral Kontekstual Integral*, Yogyakarta: AsdaMEDIA, 2017, hlm. 242-245.

Tantangan Aktual: Radikalisasi dan Korupsi Sektor Investasi¹⁵

Radikalisasi investasi menjadi bahasa yang paling tepat untuk membahasakan konsen pemerintahan Jokowi-Maruf Amin untuk mendongkrak perekonomian Indonesia. Namun, investasi yang kian diradikalisasi tanpa memperhatikan aspek keutuhan ciptaan dan daya dukung lingkungan, juga disertai pembungkaman suara kritis warga, justru akan menyebabkan terjadinya degradasi ekologis dan memperburuk citra demokrasi di negeri ini.

Masuknya investasi asing di Indonesia mengalami pasang surut. Fakta sejarah menunjukkan bahwa modal asing sudah masuk sejak zaman kolonial. Pada masa kolonial, melalui Undang-Undang Agraria 1870, pemerintah membuka pintu bagi masuknya modal asing di sektor perkebunan. Namun, pasca-kemerdekaan terutama pada pemerintahan Presiden Sukarno, investasi asing tak lagi masuk Indonesia. Proklamator Sukarno dikenal sebagai Presiden yang dengan tegas menolak penanaman modal asing. Bahkan, dia menolak investasi dengan ungkapan terkenalnya; "Persetan dengan bantuanmu, go to hell your aid." Sikap Sukarno dilatari oleh visi dasarnya membangun negeri ini, yakni, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Namun, cita-cita kemandirian Sukarno diubah oleh Presiden Suharto. Dengan alasan memperbaiki perekonomian nasional, Indonesia di bawah kendali Suharto membuka pintu selebar-lebarnya terhadap masuknya investasi asing. Orientasi ekonomi Suharto yang pro-investasi asing tersebut dikukuhkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) yang diterbitkan pada April Tahun 1967. Terhitung tiga bulan sesudah pemberlakuan undang-undang tersebut, *Freeport Sulphur Incorporated* menandatangani sebuah kontrak karya untuk melakukan kegiatan penambangan emas dan tembaga di Papua. Berbeda dengan Sukarno, Presiden Suharto dikenal sebagai presiden yang amat terbuka terhadap penanaman modal asing. Kebijakan Presiden Suharto tersebut terus dijalankan oleh presiden-presiden selanjutnya hingga saat ini. Maka,

¹⁵ Bagian ini diolah dari artikel penulis sendiri berjudul: Radikalisasi Investasi dan Nasib Keseimbangan Lingkungan, dimuat dalam Harian *Flores Pos*, Sabtu 14 Desember 2019.

dapat dikatakan bahwa sejak Presiden Suharto, Indonesia jadi negara yang amat bergantung kepada kekuatan modal asing/investasi untuk membangun perekonomian nasional.

Deregulasi Jokowi

Kebijakan membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi semakin kencang dalam masa pemerintahan Jokowi. Dalam periode pertama pemerintahannya, Jokowi mengeluarkan begitu banyak paket deregulasi¹⁶ untuk mempermudah masuknya investasi. Kebijakan tersebut semakin gencar dalam periode kedua ini. Pemerintahan Jokowi ingin melanjutkan agenda deregulasi, yaitu dengan memberangus berbagai regulasi yang menghambat, termasuk regulasi dan birokrasi berbelit di daerah. Secara tegas, Presiden Jokowi menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Dalam kesempatan ini, Jokowi meminta para kepala daerah dan para pimpinan DPRD untuk mempermudah masuknya investasi di daerah. Secara khusus, Jokowi meminta kepala daerah untuk mengurangi dan tidak membuat regulasi-regulasi yang justru mengurangi investasi. Yang paling menarik adalah Jokowi bahkan memerintahkan aparat penegak hukum untuk mendukung iklim investasi. Menarik karena bagi pejuang demokrasi, hal tersebut menimbulkan tanda tanya, apakah pemerintah bermaksud mempermudah investasi dengan menggunakan aparat hukum untuk membungkam kebebasan sipil.

¹⁶ Deregulasi tidak dimaknai sebagai peniadaan atau pengurangan aturan. Deregulasi pada hakikatnya hanya sekadar pengalihan wewenang terhadap pengaturan tersebut. Jika regulasi umumnya (sebelum dilakukan deregulasi) dikeluarkan oleh pemerintah, maka deregulasi mengalihkan wewenang tersebut menjadi *self-regulation*. *Self-regulation* bermakna pengaturan oleh diri sendiri. Diri sini dapat berbentuk individu, lembaga, perusahaan nasional maupun multinasional, maupun oleh pemerintah daerah. Dengan konteks semacam ini, jika dahulu regulasi hanya diciptakan oleh pihak yang berwenang dan ditujukan untuk semua pihak, sekarang karena *self* memegang kekuasaan membuat aturan, maka kemungkinan terbesar adalah aturan tersebut akan saling berbenturan. Dan tentunya aturan yang memiliki kekuatanlah yang akan menang. Kekuatan yang sangat menentukan sekarang ini adalah modal, dan hal itu menjadi modal utama *Multi National Corporation* (MNC). Dialah yang berhak memenangkan permainan regulasi ini. Lebih lengkap mengenai definisi deregulasi dan seluk beluknya, lih. Herry B. Priyono, "Filsafat Deregulasi" dalam *Kompas* 1 Juni 2005.

Nasib Keutuhan lingkungan

Isu lain yang juga penting adalah perihal nasib keutuhan ciptaan. Sebab, investasi yang kian diradikalisasi tanpa memperhatikan aspek keutuhan ciptaan dan daya dukung lingkungan, juga disertai pembungkaman suara kritis warga, justru akan menyebabkan terjadinya degradasi ekologis. Fakta empiris menunjukkan bahwa pemutlakan keuntungan demi akumulasi modal sebagai senjata mengejar kemakmuran yang menjadi corak khas investasi telah banyak merusakkan lingkungan hidup. Cita-cita meraih kemakmuran digapai dengan mengorbankan keutuhan ciptaan.

Ancaman degradasi kian nyata tatkala pemerintah merencanakan penghapusan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai persyaratan melakukan investasi. Penghapusan syarat adanya Amdal dan IMB tersebut sudah dimulai dengan dimunculkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.38/MEBLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019. Dalam Pasal 6 peraturan tersebut dinyatakan bahwa tidak ada lagi kewajiban Amdal bagi eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi termasuk panas bumi.

Pemerintah berdalih bahwa penghapusan tersebut merupakan bentuk penyederhanaan izin bagi investasi. Pemerintah berkeyakinan bahwa karena terlalu banyak peraturan, termasuk keharusan Amdal dan IMB justru menghambat laju investasi. Investasi yang terhambat akan menyebabkan laju ekonomi melambat dan agenda penciptaan lapangan kerja terhalang. Dengan argumentasi seperti itu, maka komitmen pemerintah terhadap keutuhan ciptaan amat patut dipertanyakan. Sebab, IMB dan Amdal merupakan instrumen yang amat penting sebagai proteksi terhadap lingkungan. IMB dan Amdal merupakan perangkat yang diamanatkan konstitusi yang berperan untuk memastikan adanya keseimbangan ruang, keutuhan ekologis, sekaligus sebagai bentuk proteksi dan penghormatan terhadap budaya dan masyarakat lokal. Maka, tatkala pemerintah menghapus syarat tersebut demi kemudahan investasi, maka ancaman kerusakan ekologis dan degradasi budaya menjadi kian nyata. Ketundukan pemerintah terhadap kekuatan modal merupakan berita buruk bagi perjuangan keutuhan ciptaan. Saat ini, populasi manusia secara geometris

berkembang pesat, sementara banyak lahan mengalami erosi, hutan merosot, spesies sedang menghadapi pemusnahan, suplai air bersih berkurang, perikanan menurun, dan polusi mengancam kesehatan manusia.¹⁷ Cita-cita pembangunan berkelanjutan kian menguap.

Lahan Korupsi

Jika pemerintah mau jujur, sebenarnya buruknya iklim investasi di Indonesia tidak terutama disebabkan oleh berbagai regulasi terkait perlindungan keutuhan lingkungan, tetapi lebih besar disebabkan oleh kultur korupsi yang amat mengakar dalam setiap pelayanan publik kita. Studi lapangan menunjukkan bahwa birokrasi yang lamban dan cenderung koruptif justru menjadi sebab utama terhambatnya investasi. Dalam banyak kasus amat jelas terlihat bahwa banyak dokumen yang dikeluarkan untuk izin investasi termasuk IMB dan Amdal tidak lepas dari praktik-praktik layanan pemerintahan yang cenderung koruptif.

Bahkan, dalam banyak kasus terkait investasi ditemukan bahwa banyak sekali izinan investasi yang diberikan oleh para kepala daerah dengan mahar yang tak sedikit. Tak sedikit kepala daerah yang menggadaikan dokumen IMB dan Amdal kepada investor untuk menjadi modal dalam kontestasi politik. Jadi, sebenarnya bukan IMB atau Amdal yang menghambat investasi. Penghambat utama investasi adalah kultur birokrasi dan politik kita yang sudah terlanjur jatuh dalam kubangan korupsi yang amat mengakar. Saking dalamnya kubangan korupsi, sampai-sampai kita susah membayangkan ada pengurusan izin investasi yang dikerjakan tanpa korupsi dan manipulasi.

Kemestian Teologi Ekologi

Mengapa teologi ekologi menjadi sebuah kemestian? Pertama, karena ancaman ekosida atau perusakan lingkungan terjadi secara masif saat ini. Perusak lingkungan bukanlah orang-orang kecil dan sederhana, tetapi oleh kuasa politik dan kekuatan korporasi. Kenyataan menunjukkan bahwa ambisi mengejar kemajuan dan kemakmuran digapai dengan pilihan politik pembangunan yang merusakkan lingkungan hidup. Kedua, karena perusakan lingkungan yang masif (ekosida) pada akhirnya pasti

¹⁷ S. Graves and Waddock S. (1999), "Institutional Owners and Corporate Responsibility", *Social Review and Management Journal*, Vol. 37.

mengorbankan orang miskin dan sederhana. Maka, jika Gereja mengikuti Yesus Kristus yang mengidentikkan diri-Nya dengan orang miskin dan amat peduli dengan mereka, maka Gereja seharusnya membumikan teologi ekologi dan menggiatkan pastoral (diakonia) ekologi.

Teologi ekologi yang dimaksudkan adalah teologi yang merefleksikan lingkungan hidup dalam terang iman dan wahyu. Secara tegas dapat dikatakan bahwa teologi ekologi ingin merefleksikan maksud Allah berkaitan dengan alam ciptaan di satu sisi, sekaligus merefleksikan alam ciptaan dengan segala keindahan dan kerusakannya bukan semata sebagai fakta duniawi semata, tetapi dalam terang pewahyuan dan iman akan Tuhan.¹⁸ Teologi ekologi dapat terlihat dan diterangkan melalui Kitab Suci dan ajaran Gereja.

Lingkungan Hidup dalam Pandangan Kitab Suci Kristiani

Pertama-tama dapat ditegaskan bahwa lingkungan hidup memiliki martabat yang besar dan mulia dalam perspektif Kitab Suci. Menurut Kitab Suci, dunia dan segala isinya sungguh dikehendaki oleh Allah dan karena itu semua baik adanya (bdk. Kej. 1:31).¹⁹ Alam ciptaan sungguh baik karena pertama-tama diciptakan oleh Allah sendiri. Allah adalah Sang Pencipta. Dialah "awal dan akhir, asal dan tujuan seluruh alam ciptaan".²⁰ Kitab Suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, melihat alam secara fisik sungguh baik adanya dan bahwa alam semesta ini sanggup merefleksikan penciptaannya.

Karena dunia diciptakan Allah dengan berfirman dan manusia diciptakan seturut gambar Allah, maka ciptaan merupakan pernyataan diri Allah, wahyu Allah yang pertama dan melalui dunia, dengan memandang dunia dan pelbagai fenomena di dalam dunia, manusia bisa mengenal Allah sebagaimana kita lihat dalam pelbagai agama alam yang terutama memandang Allah seturut apa yang tampak dalam ciptaan.²¹

¹⁸ Stephen B. Bevans, *Loc.cit.*

¹⁹ Georg Kirchberger, *Allah Menggugat Sebuah Dogmatik Kristiani*, Maumere: Ledalero, 2007, hlm. 258.

²⁰ Berthold A. Pareira, Guido Tisera, dan Martin Harun, *Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan*, Jakarta: Lembaga Biblika Indonesia, 2007, hlm.136.

²¹ Georg Kirchberger, *Allah Menggugat, Op. Cit.*, hlm. 259.

Dengan demikian, semua makhluk, dengan segala keanekaragaman dan keunikannya sungguh menggambarkan keagungan dan kemahakusaan Allah. Pemazmur katakan; "Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangan-Nya dan dalam taurat-Nya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya" (Mazmur 19:1-2). Namun, selain untuk kemuliaan Tuhan, ciptaan juga bertujuan agar semua makhluk bahagia. "Kemuliaan Allah dan kebahagiaan makhluk rohaniah merupakan kedua tujuan karya penciptaan dan sebenarnya bukan dua, melainkan satu tujuan yang rangkap."²² Namun, kebahagiaan manusia yang diberikan Allah ini menuntut tanggung jawab dari manusia sendiri.

Secara singkat, pandangan Kitab Suci Kristen tentang ciptaan dan mengenai tanggung jawab manusia di dalamnya mengerucut kepada dua aspek penting, yaitu kepemilikan Allah dan pelayanan manusia. Dua aspek penting ini memperlihatkan bahwa Allah sebagai Sang Pencipta menempatkan manusia sebagai ciptaan-Nya yang hidup bersama makhluk ciptaan-Nya yang lain.²³ Di antara segala ciptaan, manusia adalah satu-satunya makhluk yang secitra dengan Allah (bdk. Kej. 1:27). Sebagai citra Allah, manusia mempunyai martabat sebagai pribadi yang mampu mengenali dirinya sendiri, menyadari kebersamaan dirinya dengan orang lain, dan bertanggung jawab atas makhluk ciptaan yang lain. Manusia adalah rekan kerja Allah dalam menata, menjaga, memelihara, dan mengembangkan seluruh alam semesta ini. Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk memelihara dan mengolah dengan bijaksana alam semesta ini serta berupaya menciptakan hubungan yang harmonis di antara semua ciptaan (bdk. Kej. 2:15).²⁴ Oleh karena itu, manusia harus mengelola bumi dengan segala isinya ini dalam kesucian dan keadilan. Manusia tidak berhak memboroskan dan merusak alam serta sumber-sumbernya dengan alasan apa pun.

Kehadiran Allah di dunia dalam diri Yesus Kristus ingin menyatakan bahwa kasih-Nya amat besar terhadap manusia dan semua ciptaan. Karya penebusan Allah dalam diri Yesus Kristus juga ingin menjangkau

²² *Ibid.*

²³ William Chang, *Moral Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Kanisius, 2001, hlm. 46.

²⁴ Bdk. Paus Fransiskus, *Laudato Si*, Terj. Martin Harun, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2015, Artikel. 66-68, hlm. 41-43.

semua ciptaan. Dengan darah salib Kristus, segala sesuatu di bumi dan di surga diperdamaikan oleh Allah (bdk. Kol. 1:19-20). Rasul Paulus dengan tegas menyatakan bahwa karya penyelamatan Allah tidak hanya untuk manusia yang berdosa tetapi meliputi segala makhluk dan seluruh alam semesta. Oleh karena itu, sikap pemberian diri yang disertai dengan kerendahan hati manusia terhadap yang lain sebagaimana telah dilakukan oleh Yesus Kristus (bdk. Flp. 2:1-11) mesti diperluas untuk semua makhluk ciptaan.

Pengelolaan Alam Ciptaan Menurut Ajaran Gereja

Ada beberapa pertimbangan kunci dari ajaran Gereja perihal pengelolaan lingkungan hidup. Pertimbangan-pertimbangan tersebut akan diuraikan secara singkat dalam beberapa pokok selanjutnya.

Alam Ciptaan sebagai Sakramen dan Perlunya Pertobatan dari Kesesatan Antropologis

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kitab Suci menempatkan alam ciptaan sebagai tanda kehadiran dan cinta kasih Allah kepada dunia dan manusia. Sementara segala kerusakan dalam alam lebih banyak dipengaruhi oleh keserakahan manusia. Terdapat kekacauan relasi antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam ciptaan akibat dosa manusia. Ada semacam kesesatan antropologis terutama berkaitan dengan konteks dan maksud awal ciptaan.²⁵ Kesanggupan manusia dalam arti tertentu "mengubah dan menciptakan dunia" membuat dia lupa bahwa segala kemampuan dan kegiatannya itu selalu didasarkan pada pengaruhan segalanya oleh Allah menurut maksud-Nya semula. Manusia telah bertindak salah kaprah seolah dia boleh seenaknya menaklukkan bumi tanpa syarat. Manusia bukannya menjalankan tugasnya bekerja sama dengan Allah, tetapi malahan ia menggantikan tempat Allah dan hal itu justru membangkitkan pemberontakan alam yang telah diatur Allah secara teratur tetapi dirusakkan oleh manusia sendiri.²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Yohanes Paulus II, *Centesimus Annus*, Terj. R. Hardawiryana, Cetakan II, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1992, Artikel 37, *Op. Cit.*, p. 50.

Menyadari semakin meluasnya kerusakan alam ciptaan, maka manusia diminta untuk kembali menghargai dan mengikuti maksud awal ciptaan. Gereja melalui ajaran sosialnya menegaskan bahwa Allah telah mengaruniakan segalanya (alam ciptaan) kepada manusia dan manusia hanya diminta untuk menghormati kebaikan Allah itu.

Allah tidak saja mengaruniakan bumi dan segala harta benda kepada manusia, tetapi manusia sendiri adalah karunia Allah sendiri. Oleh karena itu, manusia wajib juga menghormati struktur kodrati dan moril yang diterimanya dari Allah.²⁷

Secara lebih jelas, ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* artikel 34 menggariskan;

Kekuasaan yang dianugerahkan kepada manusia oleh Sang Pencipta bukanlah suatu kekuasaan mutlak. Orang juga tidak dapat berbicara tentang kebebasan untuk "menggunakan dan menyalahgunakan" atau menghabiskan barang-barang menurut kesenangan seseorang. Pembatasan yang diberikan sejak permulaan oleh Sang Pencipta sendiri dan secara simbolis diungkapkan dengan larangan untuk tidak "makan dari buah pohon itu" (Kej. 2:16-17) dengan cukup jelas menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan dunia alami, kita takluk bukan saja pada hukum-hukum biologis tetapi hukum moral yang tidak dapat diperkosa tanpa keraguan.²⁸

Perlunya Tanggung Jawab dan Solidaritas Lintas Generasi

Kepedulian terhadap lingkungan hidup menyajikan sebuah tantangan kepada setiap orang untuk menghormati alam lingkungan sebagai harta milik bersama yang diperuntukkan bagi semua orang dengan mencegah siapa pun yang merusakkan lingkungan, termasuk yang bermotif ekonomi sekadar untuk menumpukkan kekayaan. Tanggung jawab terhadap lingkungan hidup tidak saja karena kebutuhan-kebutuhan saat sekarang tetapi juga kebutuhan-kebutuhan generasi mendatang.

²⁷ Artikel 38, *Ibid.*, hlm. 52.

²⁸ Yohanes Paulus II, *Sollicitudo Rei Socialis*, Terj. Petrus Turang, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1988, Artikel 34, hlm. 53.

Tentang pentingnya tanggung jawab untuk menyiapkan lingkungan yang nyaman bagi generasi mendatang, Paus Paulus VI dalam ensiklik *Populorum Progressio* menulis;

Kita menjadi ahli waris angkatan-angkatan sebelum kita dan kita menuai keuntungan dari usaha-usaha orang-orang sezaman. Kita mempunyai kewajiban terhadap semua orang. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengabaikan kesejahteraan mereka yang akan menyusul kita untuk menumbuhkan bangsa manusia.²⁹

Inilah tanggung jawab yang mesti dipegang oleh generasi-generasi sekarang terhadap generasi-generasi yang akan datang.³⁰ Gereja dalam ajaran sosialnya juga amat menekankan pentingnya tanggung jawab yang harus tertuang dalam produk dan penegakan hukum yang membela keutuhan ciptaan.

Pembangunan Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan

Sikap Gereja yang dinilai terlalu kritis terhadap investasi sering dianggap sebagai penghambat masuknya investasi ke wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Gereja bahkan dinilai anti investasi dan karena itu menghalangi pertumbuhan ekonomi di NTT. Padahal, sebagai daerah miskin, NTT seharusnya “ramah” menerima investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan terlalu kritis terhadap dunia investasi, Gereja dituduh justru melanggengkan kemiskinan yang sudah lama mendera daerah ini. Pertanyaan kita, benarkah Gereja anti investasi? Betulkah Gereja menentang pertumbuhan ekonomi dan karena itu membenarkan langgengnya kemiskinan?

Terhadap tuduhan seperti ini pertama-tama perlu dijelaskan bahwa cita-cita utama keberadaan Gereja adalah untuk keselamatan dunia dan manusia, baik jasmani maupun rohani. Maka, Gereja tidak semata berkonsentrasi kepada keselamatan jiwa manusia yang bersifat eskatologis, tetapi juga ingin berperan menghadirkan kesejahteraan manusia di dunia (sekarang). Dengan demikian, Gereja sama sekali tidak “ramah” terhadap faktum kemiskinan, namun Gereja justru

²⁹ Yosef Maria Florisan, Paul Budi Kleden, dan Otto Gusti Madung (Penerj.), *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, Maumere: Ledalero, 2009, hlm. 317.

³⁰ Yohanes Paulus II, *Centesimus Annus*, Artikel 37, *Op. Cit.*, hlm. 52.

ingin aktif memerangi kemiskinan. Oleh karena itu, Gereja sudah pasti mendukung segala usaha yang membantu membawa masyarakat menuju kesejahteraan. Sebaliknya, Gereja menentang segala upaya termasuk yang “berkedok pembangunan” yang justru membawa masyarakat/umat kepada kemiskinan dalam segala bentuknya. Gereja memberi catatan khusus terkait pola pengembangan ekonomi yang berdampak langsung bagi lingkungan hidup. Melalui ajaran sosialnya, Gereja mengharapkan agar program-program pengembangan ekonomi mesti secara saksama memperhatikan perlunya menghormati keutuhan serta irama-irama alam karena sumber-sumber daya alam itu terbatas dan beberapa darinya tidak dapat diperbarui. Di sini, ada kebutuhan untuk menentang irama eksploitasi yang membahayakan ketersediaan beberapa sumber daya alam, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

Secara tegas Ajaran Sosial Gereja (ASG) menggariskan agar segala kegiatan ekonomi mesti menghormati lingkungan.

Sistem ekonomi yang menghormati lingkungan hidup tidak akan menempatkan maksimalisasi keuntungan sebagai satu-satunya tujuannya, karena perlindungan atas lingkungan hidup tidak dapat dijamin semata-mata berdasar pada perhitungan finansial menyangkut biaya dan laba.³¹

Di sini harus ada keseimbangan antara usaha pembangunan ekonomi dengan kebutuhan-kebutuhan perlindungan lingkungan hidup. Setiap kegiatan ekonomi yang mendayagunakan sumber-sumber daya alam mesti juga peduli untuk melindungi lingkungan hidup. Untuk itu Gereja melalui ajaran sosialnya berharap agar kekuatan pasar tidak terlalu mendominasi sistem ekonomi. Sebab, dalam keyakinan ASG, lingkungan hidup adalah salah satu harta milik yang tidak dapat dilindungi atau dikembangkan secara memadai oleh kekuatan pasar.³²

Mempertimbangkan Nasib Masyarakat Adat (Lokal)

Terkait dengan usaha menjaga keutuhan ciptaan, Gereja melalui ajaran sosialnya juga berusaha memberikan perlindungan terhadap

³¹ *Kompendium Ajaran Sosial Gereja, Op. Cit.*, hlm. 323.

³² Yohanes Paulus II, *Centesimus Annus*, Art. 40, *Op. Cit.*, hlm. 54-55.

masyarakat adat dari kepentingan industri/ekonomi. Sebab, menurut ASG, hubungan suku-suku pribumi dengan tanah serta sumber daya merupakan sebuah ungkapan yang hakiki tentang jati diri mereka.³³ Dengan demikian, perlindungan terhadap masyarakat adat penting dilakukan sebab kepentingan industri sering kali sangat kuat mengusir mereka dari tanah mereka sendiri yang merupakan simbol jati diri mereka. Orang Manggarai katakan; *Long ata lonto, lonto ata long*. Oleh karena itu, berhadapan dengan investasi ekonomi yang semakin masif, hak-hak suku pribumi mesti tetap dilindungi sewajarnya.

Bahkan, menurut ASG, suku-suku pribumi menyajikan teladan tentang satu kehidupan yang dilakoni dalam keselarasan dengan lingkungan hidup yang telah mereka kenal dengan sangat baik dan telah mereka pelihara pula.³⁴ Pengalaman mereka yang luar biasa yang merupakan sumber daya yang tak tergantikan bagi semua umat manusia, terancam risiko akan punah dengan lingkungan hidup dari mana mereka berasal.

Pastoral Ekologi

Kian menguatnya dosa-dosa ekologis membawa daya rusak luar biasa bagi alam ciptaan. Bencana alam di berbagai tempat dan perubahan iklim yang kian nyata adalah akibat kecerobohan manusia merusakkan alam ciptaan secara serampangan. Oleh karena itulah, pembumian teologi ekologi dalam kebijakan dan tindakan pastoral ekologi mendesak dilakukan. Tindakan pastoral ekologi yang dilakukan perlu dimulai dari usaha tanpa henti untuk menyerukan perlunya pertobatan ekologis.

Menyerukan Pertobatan Ekologis

Menyadari semakin rusaknya relasi manusia dengan alam ciptaan, maka seruan untuk segera dilakukannya pertobatan ekologis kian lantang diperdengarkan akhir-akhir ini. Editorial *Media Indonesia* tercatat pernah mengusung tema pertobatan ekologis. Latar aktual dari topik editorial tersebut adalah banyaknya bencana alam di berbagai tempat di tanah air dengan latar bencana tragis yang sama, bedah editorial tersebut menyerukan adanya pertobatan ekologis yang ditandai

³³ Komentarium Ajaran Sosial Gereja, *Op. Cit.*, hlm. 324.

³⁴ *Ibid.*

oleh penghargaan sewajarnya terhadap alam ciptaan. Pentingnya pertobatan ekologis karena ada indikasi signifikan yang menunjukkan semakin menguatnya dosa-dosa ekologis yang dilakukan manusia dewasa ini. Dosa ekologis itu banyak dilatari oleh motif-motif ekonomi dan politik; hanya untuk memenuhi hasrat tak terbandung manusia akan kuasa dan harta.

Paus Fransiskus dalam Ensiklik *Laudato Si* Art. 8 mengutip pidato Patriark Bartolomeus di Santa Barbara, California;

Bagi manusia yang menghancurkan keanekaragaman hayati ciptaan; bagi manusia yang mengurangi keutuhan bumi dengan menyebabkan perubahan iklim, dengan menggunduli hutan alamnya atau menghancurkan lahan-lahan basahnya; bagi manusia yang mencemari perairan di bumi, tanahnya, udaranya dan hidupnya—semuanya ini adalah dosa. Kejahatan terhadap alam adalah dosa terhadap diri kita sendiri dan dosa terhadap Allah.³⁵

Dengan pendasaran ini, maka amat tepat jika Paus Fransiskus dalam dokumen yang sama menyerukan pertobatan ekologis. Sebab, akar krisis ekologis saat ini bersumber dari dosa kerakusan manusia. Karena itu, diperlukan pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis adalah pertobatan personal serentak pertobatan komunal. Pertobatan ini mensyaratkan pergumulan rangkap tiga.³⁶ Pertama, pertobatan adalah ungkapan rasa syukur dan kemurahan hati terhadap dunia yang merupakan “hadiah” dari Allah. Manusia secara spontan berpihak pada keutuhan alam dan lingkungan. Kedua, pertobatan mengisyaratkan bahwa manusia hanyalah salah satu (bukan satu-satunya) makhluk yang ada dalam persekutuan universal ini. Manusia tidak terputus dari makhluk lainnya, tetapi dengan seluruh jagat raya tergabung dalam persekutuan universal yang indah. Ketiga, pertobatan ekologis mendorong orang beriman untuk mengembangkan semangat dan kreativitasnya untuk menghadapi masalah dunia dengan menawarkan diri kepada Allah “sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan” (Roma 12:1). Kelebihan dan keutamaan tidak dipakai

³⁵ *Laudato Si*, hll. 11.

³⁶ *Laudato si*, Artikel 216-221, hlm. 121-124.

untuk mendominasi alam, tetapi untuk berbagi dan merawat alam sebagai tanggung jawab yang lahir dari iman.

Memperkuat Kesadaran Ekologis³⁷

Tentu saja tugas Gereja dalam menolak berbagai pilihan pembangunan dan investasi yang merusak lingkungan belum selesai. Tantangan ke depan masih sangat kuat. Kolusi sesat antara penguasa dan kekuatan korporasi masih sangat kuat mengintai berbagai wilayah terutama di Flores untuk dijadikan lahan pengerukan. Oleh karena itu, menjadi tugas mendesak yang Gereja perlu lakukan adalah terus-menerus menyerukan dan menggalakkan kesadaran ekologis yang mendorong umat Allah agar melakukan gerak peralihan dari ketidakpedulian menuju sikap peduli terhadap lingkungan hidup.

Krisis ekologi sebagai akibat dari perilaku manusia harus mendorong semua pihak untuk menata ulang hubungan dengan ciptaan. Penataan ulang ini dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran akan tanggung jawab atas kepentingan bersama semua manusia dan semua ciptaan. Penataan itu dapat dimulai dengan menyadari bahwa lingkungan hidup mempunyai peran amat penting bagi semua kehidupan sehingga harus dilindungi dari berbagai pencemaran dan perusakan. Oleh karena itu, amat penting pelayanan pastoral lingkungan hidup tidak hanya terbatas menyangkut masalah teknis, tetapi juga menyangkut proses penanaman nilai melalui pendidikan. Pendidikan nilai dimaksud bertujuan untuk membangun kesadaran manusia bahwa menghargai alam harus menjadi prioritas utama dalam usaha mencegah dan memulihkan lingkungan hidup.

Mempromosikan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yang dimaksudkan adalah bahwa usaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang tidak boleh mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan penting karena dia memiliki cita-cita dan agenda dasar yang diarahkan agar terjadi sinkronisasi, pengintegrasian dan memberi perhatian serta bobot yang sama bagi tiga aspek pembangunan, yaitu

³⁷ Bagian ini diolah dari artikel penulis sendiri berjudul: Pertobatan Ekologis dan Gerakan Ekopastoral, dimuat dalam Harian *Flores Pos*, Senin 24 Februari 2014.

aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan hidup.³⁸ Pada tempat inilah agenda pembangunan seharusnya mengikuti tiga prinsip pokok, yaitu prinsip demokrasi, prinsip keadilan, dan prinsip keberlanjutan.

Prinsip demokrasi menghendaki agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar merupakan perwujudan kehendak bersama dan demi kepentingan bersama seluruh rakyat. Sementara, prinsip keadilan dalam pembangunan adalah agar semua orang dan semua kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan dan kegiatan-kegiatan produktif, termasuk selanjutnya ikut juga dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Sementara, prinsip berkelanjutan menuntut agar agenda pembangunan dirancang dalam dimensi yang visioner dan berjangka panjang. Dengan demikian, dampak pembangunan baik positif maupun negatif dapat dideteksi dan dievaluasi dalam segala aspeknya. Sebab, dalam kenyataan sumber daya ekonomi terbatas, sedangkan aspek sosial budaya dan lingkungan hidup adalah aspek yang berdimensi jangka panjang. Untuk menunjang model pembangunan berkelanjutan, maka harus dipilih model pembangunan alternatif, yaitu pembangunan yang lebih hemat sumber daya dan mampu mensinkronkan aspek konservasi dengan aspek pemanfaatan secara arif. Salah satu cara mempromosikan pembangunan berkelanjutan adalah dengan memperkuat gerakan ekopastoral.

Menggiatkan Gerakan Ekopastoral

Selain seruan pertobatan dan pendidikan ekologis, Gereja juga amat perlu dengan gencar menggalakkan gerakan ekopastoral yang selama ini sudah dimulai di beberapa tempat. Gerakan ekopastoral penting

³⁸ Sebenarnya agenda politik lingkungan hidup telah mulai dipusatkan pada paradigma pembangunan berkelanjutan sejak tahun 1980-an. Istilah pembangunan berkelanjutan muncul pertama kali dalam *World Conservation Strategy* dari *The International Union For The Conservation Of Nature* pada 1980. Secara politik, paradigma pembangunan berkelanjutan ini sebenarnya telah diterima sebagai sebuah agenda politik pembangunan untuk semua negara di dunia dalam kesempatan KTT Bumi di Rio de Janeiro, pada 1992. Sayangnya hingga kini gagasan ini tidak banyak diimplementasikan secara global termasuk di Indonesia. Bdk. Soni Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010, hlm. 190-192.

untuk melawan sistem ekonomi/pembangunan (termasuk pertanian) eksploitatif yang tidak ramah terhadap lingkungan hidup.

Ada beberapa gerakan yang bisa dibuat untuk mengembangkan ekopastoral.³⁹ *Pertama*, menggali dan menemukan kembali praktik-praktik pertanian yang didasarkan pada kearifan lokal. Ada banyak praktik pertanian yang dibuat masyarakat lokal kita yang sangat menghargai keutuhan ciptaan. Bahkan, dalam masyarakat Manggarai, misalnya, ada keyakinan bahwa tanah garapan merupakan sesuatu yang sakral sehingga tidak pantas dieksploitasi secara membabi buta.

Kedua, Gereja perlu mengajak umat dan masyarakat untuk menghormati, menghargai, dan memuliakan sumber-sumber pangan (air, tanah, dan tanaman) sebagai bagian dari perwujudan hidup beriman dan beragama. Di sini, pewartaan iman harus juga menyentuh usaha penyelamatan lingkungan hidup dari keserakahan manusia.

Ketiga, membangun dan memperkuat kelompok-kelompok tani yang bersahabat dengan alam (pertanian organik/pertanian lestari). Kelompok-kelompok tani seperti inilah yang diharapkan mampu menjadi teladan bagi model pertanian berwawasan lingkungan. Untuk mendukung petani-petani seperti ini maka perlu diambil langkah-langkah advokasi menghadapi kebijakan-kebijakan publik yang tidak berpihak kepada kepentingan petani dan dunia pertanian yang berwawasan lingkungan.

Penutup

Dalam jebakan kapitalisme global, pembangunan kian gagal menghantar warga dan umat kepada kemakmuran dan kesejahteraan, namun lebih sebagai jalan suram yang melahirkan pencaplokan, destruksi budaya, pemiskinan sistemik dan perusakan lingkungan hidup. Tirani kapitalisme atas nama pembangunan yang ditopang secara kuat oleh kepentingan rezim politik tertentu pasti akan memicu pertumbuhan ekonomi yang dibarengi oleh parahnya kerusakan sosial, sekaligus degradasi lingkungan hidup. Pembangunan kian antagonis karena munculnya ekosida (perusakan lingkungan yang masif). Ekosida atau

³⁹ Bagian ini diolah dari artikel penulis sendiri berjudul: Pertobatan Ekologis dan Gerakan Ekopastoral, dimuat dalam Harian *Flores Pos*, Senin 24 Februari 2014

perusakan lingkungan secara masif dan sistematis, termasuk atas nama politik pembangunan pada akhirnya mencampakkan masyarakat miskin dan sederhana dalam pemiskinan yang sistemik dan kegersangan kultural. Dengan demikian pembangunan gagal membawa masyarakat kepada cita-cita kemakmuran, namun pembangunan dengan jalan ekosida justru lebih sebagai tindakan bunuh diri secara ekologis.

Berkenaan dengan jebakan pembangunan tersebut, maka amat perlu Gereja Katolik membumikan teologi ekologi, di mana Allah direfleksikan dalam konteks kerusakan lingkungan yang kian masif. Gereja mesti terus hadir secara relevan dan signifikan, dengan terus-menerus menjadi kekuatan dekolonial dengan menggiatkan pastoral ekologi, melawan tarikan badai kapitalisme global dengan kepelbagaian wajahnya yang eksploitatif atas nama pembangunan.

Daftar Pustaka

- Bevans, Stephen B. *Model-model Teologi Konstektual*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2002.
- Candraningrum, Dewi. Ekosida, link: <https://www.jurnalperempuan.org/blog/ekosida1>, diakses pada 5 Januari 2020.
- Chang, William. *Moral Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Dale, Cypri Jehan Paju. *Kuasa, Pembangunan dan Pemiskinan Sistemik*. Labuan Bajo: Sunspirit Books, 2013.
- Denar, Benny. *Mengapa Gereja (Harus!) Tolak Tambang?*. Maumere: Ledalero, 2015
- Denar, Benny. "Sisi Antagonis Pembangunan dan Opsi Dekolonial dalam Teologi Katolik". dalam Matias Daven dan Georg Kirchberger (Eds.), *Hidup Sebuah Pertanyaan Kenangan 50 Tahun STFK Ledalero*. Maumere: Ledalero, 2019.
- Denar, Benny Keristian Dahurandi, dan Vinsensius Nase. *Kiprah Gereja Katolik dalam Mendampingi Masyarakat Pasca-tambang di Kabupaten Manggarai Flores Barat – Laporan Penelitian Dosen PTAKS di Lingkungan Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia*. Ruteng: STIPAS St. Sirilus Ruteng, 2019.
- Diamond, Jared. *Collapse; How Societies Choose to Fail or Succeed*. USA: Penguin Books, 2005.
- Fransiskus. *Laudato Si*. Terj. Martin Harun. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2015.

- Goudzwaard, Bob dan Harry de Lange. *Di Balik Kemiskinan dan Kemakmuran*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Graves, S., and S. Waddock (1999), "Institutional Owners and Corporate Responsibility", *Social Review and Management Journal*, Vol. 37.
- Keraf, Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Kirchberger, Georg. *Allah Menggugat Sebuah Dogmatik Kristiani*. Maumere: Ledalero, 2007.
- Komisi Kepausan Untuk Keadilan dan Perdamaian. *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Terj. Yosef Maria Florisan. Maumere: Ledalero, 2009.
- Panitia Sinode III Keuskupan Ruteng. *Dokumen Sinode III 2013-2015 Keuskupan Ruteng Pastoral Kontekstual Integral*. Yogyakarta: asdaMEDIA, 2017.
- Pareira, Berthold A, Guido Tisera, dan Martin Harun. *Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan*. Jakarta: Lembaga Biblika Indonesia, 2007.
- Priyono, Herry B. "Filsafat Deregulasi". Opini dalam *Kompas*, Rabu 01 Juni 2005.
- Regus, Max. "Membongkar Aib Pembangunan", dalam Paul Budi Kleden, dkk (ed.). *Allah Menggugat Allah Menyembuhkan*. Maumere: Ledalero, 2012.
- Saleh, Ridha, dkk. *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2019.
- Yohanes Paulus II. *Centesimus Annus*. Terj. R. Hardawiryana. Cetakan II. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1992.
- _____. *Sollicitudo Rei Socialis*. Terj. Petrus Turang. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1988.

DOKUMEN ABU DHABI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DIALOG INTERRELIGIUS DI INDONESIA¹

Oleh Fransiskus Sales Lega²

Pendahuluan

Akhir dekade kedua milenium ke-3, Paus Fransiskus membuat suatu terobosan fenomenal dalam konteks perjumpaan antara Katolik dan Muslim. Paus Fransiskus mengadakan kunjungan apostolik ke Uni Emirat Arab (UEA) yang dikenal sebagai negeri kelahiran agama Islam pada 3 Februari 2019. Kunjungan ini patut ditorehkan pada sejarah Gereja milenium ke-3. Paus Fransiskus menciptakan sejarah baru hubungan Katolik dan Muslim. Ia meretas jalan baru untuk memantapkan relasi Katolik dan Muslim yang sudah diinisiasi oleh para pendahulunya. Kunjungan bersejarah ini membuat Paus Fransiskus tercatat sebagai Paus pertama dalam sejarah Gereja Katolik yang menjejalkan kakinya ke teluk Arab, tanah kelahiran Islam.

Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmed el-Tayeb, dalam kesadaran yang sama sebagai anak-anak Allah, membicarakan secara intens dan komprehensif berbagai persoalan yang melanda manusia dewasa ini. Hasil diskursus yang intens dan humanis ini tertuang dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan sebutan "Dokumen Abu Dhabi". Intipati dari dokumen ini adalah dialog antaragama,

¹ Tulisan ini pernah dipresentasikan dalam seminar ilmiah yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Teologi, FKIP Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus, Ruteng, pada 14 Desember 2019.

² MA Teologi STFK Ledalero, Maumere-Flores; Pengajar UNIKA St. Paulus, Ruteng, Flores.